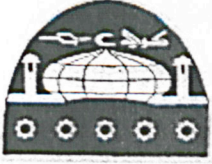


KOLEKSI
BERTANDA MERAH (REDSHOT)



KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA
جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا
ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE OF MALAYSIA

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Laporan Penyelidikan

PENGURUSAN FATWA DI NEGARA-NEGARA NUSANTARA:
PENGURUSAN FATWA DI THAILAND

PERPUSTAKAAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA	
GIFT / DONATION SUMBANGAN IKHLAS WITH BEST COMPLIMENTS	
FROM	PPS
DATE	28/10/08
ACC. NO	

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA
Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan

Perpustakaan USIM



1000044999

PENGURUSAN FATWA DI NEGARA-NEGARA NUSANTARA:
PENGURUSAN FATWA DI THAILAND

KOD: PPPP-INFAD/A/2006

LAPORAN AKHIR

KETUA PENYELIDIK:

Syed Ahmad Tarmizi Bin Syed Omar
(S 121)

PENYELIDIK BERSAMA:

Khairul Anuar Bin Mohamad
(S 184)

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA

Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan

Web Site: www.kuim.edu.my

Oktober 2006

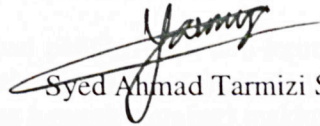
PENGAKUAN

Kami akui bahawa keseluruhan isi penyelidikan ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya kami jelaskan sumbernya.

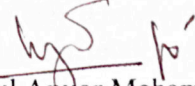
Tarikh 11 OKTOBER 2006

Tandatangan

Ketua Penyelidik:


Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar

Penyelidik Bersama:


Khairul Anuar Mohamad

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi. Selawat dan salam bagi junjungan besar Nabi Muhammad S.A.Wm sebaik-baik pribadi, bagi keluarga baginda, para sahabat dan sesiapa yang mengikuti panduan baginda hingga ke akhirnya.

Kami amat bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kami telah dapat menyempurnakan penyelidikan ini yang bertajuk “Pengurusan Fatwa di Negara-Negara Nusantara: Pengurusan Fatwa di Thailand”.

Di kesempatan ini, kami ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Majlis Agama Islam Yala, Kolej Islam Yala dan juga Rabitah Islam cawangan Bangkok di atas kerjasama yang banyak memberi maklumat dan membantu kami dalam menyiapkan penyelidikan ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kolej Universiti Islam Malaysia, INFAD dan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melakukan penyelidikan ini.

Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjaya dan menyiapkan penyelidikan ini. Semoga Allah s.w.t membalas jasa baik mereka dengan menjadikannya sebahagian daripada amalan soleh mereka di akhirat kelak.

ABSTRAK

Penyelidikan ini mengkaji pengurusan fatwa di Thailand. Justeru penyelidikan ini mengkaji sejauh mana pengurusan fatwa di Thailand mampu menyelesaikan masalah masyarakat minoriti Islam di sana. Oleh itu penyelidikan ini lebih menumpukan kepada metodologi kajian lapangan seperti temu bual dan pemerhatian di samping kajian perpustakaan dengan mengkaji beberapa dokumen berkaitan dengan tajuk. Hasil kajian mendapati bahawa pengurusan fatwa di Thailand telah wujud. Di peringkat kebangsaan urusan Islam diselenggarakan oleh Chula Ratmontri. Beliau dibantu oleh Majlis penasihatnya dalam urusan mengeluarkan fatwa yang tepat. Di peringkat wilayah pula terdapat Majlis Agama Islam Wilayah yang bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan setempat. Rujukan utama dalam proses pengeluaran fatwa ialah mazhab *Al-Shāfi'iy*. Fatwa turut didokumentasi dan disebarikan kepada masyarakat muslim melalui risalah dan buku. Terdapat juga sesetengah imam di masjid yang menggunakan buku fatwa ini sebagai bahan pengajaran selepas solat. Justeru kajian mendapati pengurusan fatwa di Thailand adalah baik walaupun terdapat beberapa aspek yang boleh diperelokkan lagi.

ABSTRACT

This study surveyed *The Management of Fatwa in Thailand*. The objective of this study is to determine how far the management is able to solve problems of minority Muslims researched. The data obtained in this study were based on interviews, observations and documents collected. They were analyzed and found that the management of Fatwa in Thailand already existed. At the national level, the Fatwa is managed by Chula Ratmontri. He is assisted by an Advisory Council. At the local level, the *Majlis Agama Islam Wilayah* is responsible in solving the local problems. The Fatwa in Thailand is based on *Al-Shāfi'iy* Sect. The Fatwa is documented and distributed to the Muslim population in the form of written texts and also for the *imams* to use as a teaching material after prayers. Result of the study showed that the management of Fatwa in Thailand is well organized though several aspects need to be improved.

DAFTAR KANDUNGAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1	PERKEMBANGAN KAJIAN
1.2	MAKLAMAT KAJIAN
1.3	OBJEKTIF KAJIAN
1.4	SKOP KAJIAN
1.5	HIPOTESIS
1.6	METODologi
1.7	RUANG LINGKUP
BAB II. KAJIAN TEORITIS	
2.1. KAJIAN TENTANG FATWA	
2.1.1	DEFINISI
2.1.2	SEJARAH
2.1.3	KELOMPOK
2.1.4	KELOMPOK
2.1.5	KELOMPOK
2.1.6	KELOMPOK
2.1.7	KELOMPOK
2.1.8	KELOMPOK
2.1.9	KELOMPOK
2.1.10	KELOMPOK
2.1.11	KELOMPOK
2.1.12	KELOMPOK
2.1.13	KELOMPOK
2.1.14	KELOMPOK
2.1.15	KELOMPOK
2.1.16	KELOMPOK
2.1.17	KELOMPOK
2.1.18	KELOMPOK
2.1.19	KELOMPOK
2.1.20	KELOMPOK
2.1.21	KELOMPOK
2.1.22	KELOMPOK
2.1.23	KELOMPOK
2.1.24	KELOMPOK
2.1.25	KELOMPOK
2.1.26	KELOMPOK
2.1.27	KELOMPOK
2.1.28	KELOMPOK
2.1.29	KELOMPOK
2.1.30	KELOMPOK
2.1.31	KELOMPOK
2.1.32	KELOMPOK
2.1.33	KELOMPOK
2.1.34	KELOMPOK
2.1.35	KELOMPOK
2.1.36	KELOMPOK
2.1.37	KELOMPOK
2.1.38	KELOMPOK
2.1.39	KELOMPOK
2.1.40	KELOMPOK
2.1.41	KELOMPOK
2.1.42	KELOMPOK
2.1.43	KELOMPOK
2.1.44	KELOMPOK
2.1.45	KELOMPOK
2.1.46	KELOMPOK
2.1.47	KELOMPOK
2.1.48	KELOMPOK
2.1.49	KELOMPOK
2.1.50	KELOMPOK
2.1.51	KELOMPOK
2.1.52	KELOMPOK
2.1.53	KELOMPOK
2.1.54	KELOMPOK
2.1.55	KELOMPOK
2.1.56	KELOMPOK
2.1.57	KELOMPOK
2.1.58	KELOMPOK
2.1.59	KELOMPOK
2.1.60	KELOMPOK
2.1.61	KELOMPOK
2.1.62	KELOMPOK
2.1.63	KELOMPOK
2.1.64	KELOMPOK
2.1.65	KELOMPOK
2.1.66	KELOMPOK
2.1.67	KELOMPOK
2.1.68	KELOMPOK
2.1.69	KELOMPOK
2.1.70	KELOMPOK
2.1.71	KELOMPOK
2.1.72	KELOMPOK
2.1.73	KELOMPOK
2.1.74	KELOMPOK
2.1.75	KELOMPOK
2.1.76	KELOMPOK
2.1.77	KELOMPOK
2.1.78	KELOMPOK
2.1.79	KELOMPOK
2.1.80	KELOMPOK
2.1.81	KELOMPOK
2.1.82	KELOMPOK
2.1.83	KELOMPOK
2.1.84	KELOMPOK
2.1.85	KELOMPOK
2.1.86	KELOMPOK
2.1.87	KELOMPOK
2.1.88	KELOMPOK
2.1.89	KELOMPOK
2.1.90	KELOMPOK
2.1.91	KELOMPOK
2.1.92	KELOMPOK
2.1.93	KELOMPOK
2.1.94	KELOMPOK
2.1.95	KELOMPOK
2.1.96	KELOMPOK
2.1.97	KELOMPOK
2.1.98	KELOMPOK
2.1.99	KELOMPOK
2.1.100	KELOMPOK
2.2	KELOMPOK
2.3	KELOMPOK
2.4	KELOMPOK
2.5	KELOMPOK
2.6	KELOMPOK
2.7	KELOMPOK
2.8	KELOMPOK
2.9	KELOMPOK
2.10	KELOMPOK
2.11	KELOMPOK
2.12	KELOMPOK
2.13	KELOMPOK
2.14	KELOMPOK
2.15	KELOMPOK
2.16	KELOMPOK
2.17	KELOMPOK
2.18	KELOMPOK
2.19	KELOMPOK
2.20	KELOMPOK
2.21	KELOMPOK
2.22	KELOMPOK
2.23	KELOMPOK
2.24	KELOMPOK
2.25	KELOMPOK
2.26	KELOMPOK
2.27	KELOMPOK
2.28	KELOMPOK
2.29	KELOMPOK
2.30	KELOMPOK
2.31	KELOMPOK
2.32	KELOMPOK
2.33	KELOMPOK
2.34	KELOMPOK
2.35	KELOMPOK
2.36	KELOMPOK
2.37	KELOMPOK
2.38	KELOMPOK
2.39	KELOMPOK
2.40	KELOMPOK
2.41	KELOMPOK
2.42	KELOMPOK
2.43	KELOMPOK
2.44	KELOMPOK
2.45	KELOMPOK
2.46	KELOMPOK
2.47	KELOMPOK
2.48	KELOMPOK
2.49	KELOMPOK
2.50	KELOMPOK
2.51	KELOMPOK
2.52	KELOMPOK
2.53	KELOMPOK
2.54	KELOMPOK
2.55	KELOMPOK
2.56	KELOMPOK
2.57	KELOMPOK
2.58	KELOMPOK
2.59	KELOMPOK
2.60	KELOMPOK
2.61	KELOMPOK
2.62	KELOMPOK
2.63	KELOMPOK
2.64	KELOMPOK
2.65	KELOMPOK
2.66	KELOMPOK
2.67	KELOMPOK
2.68	KELOMPOK
2.69	KELOMPOK
2.70	KELOMPOK
2.71	KELOMPOK
2.72	KELOMPOK
2.73	KELOMPOK
2.74	KELOMPOK
2.75	KELOMPOK
2.76	KELOMPOK
2.77	KELOMPOK
2.78	KELOMPOK
2.79	KELOMPOK
2.80	KELOMPOK
2.81	KELOMPOK
2.82	KELOMPOK
2.83	KELOMPOK
2.84	KELOMPOK
2.85	KELOMPOK
2.86	KELOMPOK
2.87	KELOMPOK
2.88	KELOMPOK
2.89	KELOMPOK
2.90	KELOMPOK
2.91	KELOMPOK
2.92	KELOMPOK
2.93	KELOMPOK
2.94	KELOMPOK
2.95	KELOMPOK
2.96	KELOMPOK
2.97	KELOMPOK
2.98	KELOMPOK
2.99	KELOMPOK
2.100	KELOMPOK
2.101	KELOMPOK
2.102	KELOMPOK
2.103	KELOMPOK
2.104	KELOMPOK
2.105	KELOMPOK
2.106	KELOMPOK
2.107	KELOMPOK
2.108	KELOMPOK
2.109	KELOMPOK
2.110	KELOMPOK
2.111	KELOMPOK
2.112	KELOMPOK
2.113	KELOMPOK
2.114	KELOMPOK
2.115	KELOMPOK
2.116	KELOMPOK
2.117	KELOMPOK
2.118	KELOMPOK
2.119	KELOMPOK
2.120	KELOMPOK
2.121	KELOMPOK
2.122	KELOMPOK
2.123	KELOMPOK
2.124	KELOMPOK
2.125	KELOMPOK
2.126	KELOMPOK
2.127	KELOMPOK
2.128	KELOMPOK
2.129	KELOMPOK
2.130	KELOMPOK
2.131	KELOMPOK
2.132	KELOMPOK
2.133	KELOMPOK
2.134	KELOMPOK
2.135	KELOMPOK
2.136	KELOMPOK
2.137	KELOMPOK
2.138	KELOMPOK
2.139	KELOMPOK
2.140	KELOMPOK
2.141	KELOMPOK
2.142	KELOMPOK
2.143	KELOMPOK
2.144	KELOMPOK
2.145	KELOMPOK
2.146	KELOMPOK
2.147	KELOMPOK
2.148	KELOMPOK
2.149	KELOMPOK
2.150	KELOMPOK
2.151	KELOMPOK
2.152	KELOMPOK
2.153	KELOMPOK
2.154	KELOMPOK
2.155	KELOMPOK
2.156	KELOMPOK
2.157	KELOMPOK
2.158	KELOMPOK
2.159	KELOMPOK
2.160	KELOMPOK
2.161	KELOMPOK
2.162	KELOMPOK
2.163	KELOMPOK
2.164	KELOMPOK
2.165	KELOMPOK
2.166	KELOMPOK
2.167	KELOMPOK
2.168	KELOMPOK
2.169	KELOMPOK
2.170	KELOMPOK
2.171	KELOMPOK
2.172	KELOMPOK
2.173	KELOMPOK
2.174	KELOMPOK
2.175	KELOMPOK
2.176	KELOMPOK
2.177	KELOMPOK
2.178	KELOMPOK
2.179	KELOMPOK
2.180	KELOMPOK
2.181	KELOMPOK
2.182	KELOMPOK
2.183	KELOMPOK
2.184	KELOMPOK
2.185	KELOMPOK
2.186	KELOMPOK
2.187	KELOMPOK
2.188	KELOMPOK
2.189	KELOMPOK
2.190	KELOMPOK
2.191	KELOMPOK
2.192	KELOMPOK
2.193	KELOMPOK
2.194	KELOMPOK
2.195	KELOMPOK
2.196	KELOMPOK
2.197	KELOMPOK
2.198	KELOMPOK
2.199	KELOMPOK
2.200	KELOMPOK
2.201	KELOMPOK
2.202	KELOMPOK
2.203	KELOMPOK
2.204	KELOMPOK
2.205	KELOMPOK
2.206	KELOMPOK
2.207	KELOMPOK
2.208	KELOMPOK
2.209	KELOMPOK
2.210	KELOMPOK
2.211	KELOMPOK
2.212	KELOMPOK
2.213	KELOMPOK
2.214	KELOMPOK
2.215	KELOMPOK
2.216	KELOMPOK
2.217	KELOMPOK
2.218	KELOMPOK
2.219	KELOMPOK
2.220	KELOMPOK
2.221	KELOMPOK
2.222	KELOMPOK
2.223	KELOMPOK
2.224	KELOMPOK
2.225	KELOMPOK
2.226	KELOMPOK
2.227	KELOMPOK
2.228	KELOMPOK
2.229	KELOMPOK
2.230	KELOMPOK
2.231	KELOMPOK
2.232	KELOMPOK
2.233	KELOMPOK
2.234	KELOMPOK
2.235	KELOMPOK
2.236	KELOMPOK
2.237	KELOMPOK
2.238	KELOMPOK
2.239	KELOMPOK
2.240	KELOMPOK
2.241	KELOMPOK
2.242	KELOMPOK
2.243	KELOMPOK
2.244	KELOMPOK
2.245	KELOMPOK
2.246	KELOMPOK
2.247	KELOMPOK
2.248	KELOMPOK
2.249	KELOMPOK
2.250	KELOMPOK
2.251	KELOMPOK
2.252	KELOMPOK
2.253	KELOMPOK
2.254	KELOMPOK
2.255	KELOMPOK
2.256	KELOMPOK
2.257	KELOMPOK
2.258	KELOMPOK
2.259	KELOMPOK
2.260	KELOMPOK
2.261	KELOMPOK
2.262	KELOMPOK
2.263	KELOMPOK
2.264	KELOMPOK
2.265	KELOMPOK
2.266	KELOMPOK
2.267	KELOMPOK
2.268	KELOMPOK
2.269	KELOMPOK
2.270	KELOMPOK
2.271	KELOMPOK
2.272	KELOMPOK
2.273	KELOMPOK
2.274	KELOMPOK
2.275	KELOMPOK
2.276	KELOMPOK
2.277	KELOMPOK
2.278	KELOMPOK
2.279	KELOMPOK
2.280	KELOMPOK
2.281	KELOMPOK
2.282	KELOMPOK
2.283	KELOMPOK
2.284	KELOMPOK
2.285	KELOMPOK
2.286	KELOMPOK
2.287	KELOMPOK
2.288	KELOMPOK
2.289	KELOMPOK
2.290	KELOMPOK
2.291	KELOMPOK
2.292	KELOMPOK
2.293	KELOMPOK
2.294	KELOMPOK
2.295	KELOMPOK
2.296	KELOMPOK
2.297	KELOMPOK
2.298	KELOMPOK
2.299	KELOMPOK
2.300	KELOMPOK
2.301	KELOMPOK
2.302	KELOMPOK
2.303	KELOMPOK
2.304	KELOMPOK
2.305	KELOMPOK
2.306	KELOMPOK
2.307	KELOMPOK

KANDUNGAN

DAFTAR KANDUNGAN

Kandungan	Halaman
PENGAKUAN	i
PENGHARGAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR KANDUNGAN	v
 BAB I: PENGENALAN	
1.1 PERMASALAHAN KAJIAN	1
1.2 MATLAMAT KAJIAN	2
1.3 OBJEKTIF KAJIAN	2
1.4 SKOP KAJIAN	2
1.5 HIPOTESIS	3
1.6 METODOLOGI KAJIAN	4
1.7 SOROTAN LITERATUR	4
 BAB II: THAILAND DAN HUBUNGANNYA DENGAN UMAT ISLAM	
2.1 LATARBELAKANG NEGARA THAILAND	5
2.2 ISLAM DI THAILAND	7
2.3 PENTADBIRAN ISLAM DI THAILAND	8
2.4 PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI THAILAND	11
2.5 UNDANG-UNDANG DASAR KERAJAAN THAI	14
2.6 SUSUNAN PENTADBIRAN INSTITUSI ISLAM DI THAILAND	18
2.6.1 Chula Ratmontri	18
2.6.2 Komiti Islam Pusat	19
2.6.3 Komiti Islam Wilayah (Majlis Agama Islam Wilayah)	20
2.6.4 Komiti Islam Masjid (Jawatankuasa Masjid)	22
2.7 PENDIDIKAN ISLAM DI THAILAND	24
 BAB III: PENGURUSAN FATWA DI THAILAND	
3.1 PENGERTIAN FATWA	29
3.2 INSTITUSI FATWA DAN PROSES PENGURUSANNYA DI THAILAND	30
3.2.1 Peringkat Chula Ratmontri	32
3.2.2 Peringkat Majlis Agama Wilayah	33
3.3 SUMBER RUJUKAN FATWA	37
3.4 PENGGUNAAN ICT DALAM PROSES PENGELUARAN	

FATWA DI THAILAND	38
3.5 DOKUMENTASI FATWA DI THAILAND	39
3.6 CONTOH FATWA	40
3.6.1 Fatwa Chula Ratmontri	40
3.6.2 Fatwa Majelis Agama Wilayah	44
3.7 KESIMPULAN DAN CADANGAN	55
BIBLIOGRAFI	60
LAMPIRAN	62

BAB I: PENGENALAN

1.1 PERMASALAHAN KAJIAN

Fatwa adalah suatu perkara yang agak sinonim dengan seseorang muslim terutamanya ketika menghadapi persoalan semasa yang memerlukan kepada penyelesaian yang menepati tuntutan agama. Dengan bertambahnya pengeluaran fatwa daripada pihak berwajib maka suatu pengurusan yang sistematik perlu diwujudkan bagi menjamin kelancaran proses pengeluaran fatwa dan mudah dirujuk pada masa yang diperlukan. Sehubungan itu sistem pengurusan tersebut harus dikemaskini dari semasa ke semasa sesuai dengan kehendak zaman dan tempat. Oleh itu terdapat perbezaan antara sistem pengurusan antara negara-negara ASEAN memandangkan perbezaan suasana dan keperluan setempat.

Di Thailand contohnya, walaupun masyarakat muslim merupakan golongan minoriti di sana, namun pengurusan fatwa tetap wujud dalam bentuk dan acuannya yang tersendiri. Ini mungkin merujuk kepada kedudukan masyarakat muslim sebagai golongan minoriti terbesar di Thailand terutamanya di bahagian Selatan iaitu di wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Pihak kerajaan tetap memberikan sedikit ruang kepada golongan minoriti itu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat muslim di sana. Sebagai buktinya tindakan kerajaan meluluskan Akta Undang-undang Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam di Thailand pada tahun 1945. Selepas itu iaitu pada tahun 1997 Parlimen Thai telah meluluskan Akta Undang-undang Pentadbiran Institusi Agama Islam.

Namun persoalannya sejauh mana perbezaan yang wujud antara negara-negara ASEAN dalam pengurusan fatwa. Apakah keistimewaan yang dimiliki mereka dan sebaliknya?

Kajian ini pasti akan memberikan suatu natijah yang positif kepada pengurusan fatwa di Thailand dan seterusnya menjadi panduan kepada institusi fatwa di tempat lain dalam usaha penambahbaikan lagi pengurusan fatwa yang telah sedia terpakai.

1.2 MATLAMAT KAJIAN

Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengkaji pengurusan fatwa di Thailand serta melihat sejauh mana perjalanan dan aktiviti yang berkaitan dengan fatwa di negara tersebut kerana ia merupakan sebuah negara minoriti.

1.3 OBJEKTIF KAJIAN

Keseluruhan matlamat diatas boleh dicapai menerusi objektif berikut:

1. Mengetahui mekanisma penetapan dan pengurusan fatwa di Thailand.
2. Mengenal pasti metode dan langkah yang digunakan untuk menyebarkan fatwa kepada masyarakat.
3. Mengetahui sistem penguatkuasaan fatwa yang dihasilkan dan hubungannya dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah.
4. Mengkaji aspek penggunaan ICT dalam sistem pengurusan dan penyebaran fatwa.
5. Memperkaya khazanah pengetahuan tentang pengurusan fatwa bagi umat Islam.
6. Mengenal pasti aktiviti mengurus fatwa selepas diwartakan dan melihat adakah berlaku proses penelitian semula terhadap fatwa yang telah diwartakan.

1.4 SKOP KAJIAN

Pengurusan fatwa amat penting dalam menjamin kesejahteraan umat Islam khususnya serta negara Islam umumnya. Kelancaran pengurusan fatwa di sesebuah negara bergantung kepada proses pengurusan fatwa terutamanya dalam membincangkan isu-isu yang berbangkit yang mana ianya memerlukan kajian yang terperinci sebelum ianya diwartakan.

Justeru itu, kajian ini akan mengenal pasti sejauh mana kelancaran pengurusan fatwa di Thailand bermula dari timbulnya permasalahan sehinggalah diwartakan. Kajian ini juga akan melihat sejauh mana setiap fatwa yang telah diwartakan akan dikuatkuasakan, disamping mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab dalam menguatkuasakan fatwa tersebut. Sekiranya fatwa itu diwartakan adakah semua penduduk Islam di Thailand terikat dengan fatwa tersebut atau ianya sekadar menerangkan hukum Allah berdasarkan permasalahan yang dikemukakan oleh orang ramai.

Timbul persoalan sekiranya fatwa yang dikeluarkan terikat kepada semua penduduk Islam di Thailand, apakah tindakan yang akan diambil terhadap golongan yang tidak mengikut fatwa sebagaimana yang telah diwartakan. Permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam kerana kelancaran dan kelicinan pengurusan fatwa itu bergantung dalam semua aspek terutama dari segi isu yang dibincangkan sehinggalah diwartakan termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan perlaksanaannya.

Kajian ini menumpukan kepada pengkajian pengurusan fatwa serta struktur organisasi Jawatankuasa Fatwa di Thailand yang merupakan sebuah negara minoriti. Skop kajian ini tertumpu kepada aspek prosedur pengurusan fatwa dari mulanya isu dikemukakan seterusnya dibincangkan sehinggalah diwartakan, ini adalah penting untuk menilai kelancaran perjalanan pengurusan fatwa di Thailand. Kajian ini juga akan mengenal pasti aktiviti yang dijalankan oleh Jawatankuasa Fatwa dari segi pengumpulan fatwa dan sumbernya serta melihat sejauh mana penggunaan teknologi maklumat dalam memastikan kelancaran dan kelicinan pengurusan fatwa di Thailand.

1.5 HIPOTESIS

Pengurusan fatwa adalah suatu yang unik memandangkan ia berbentuk fleksibel bersesuaian dengan keperluan setempat. Ianya berkembang selaras dengan perkembangan zaman kini yang lebih mengutamakan penggunaan teknologi terkini dalam memenuhi tuntutan semasa. Oleh itu dijangkakan terdapat banyak perbezaan

dalam pengurusan fatwa antara suatu negara dengan negara lain walaupun mereka berjiran. Contohnya antara Thailand dan Malaysia.

1.6 METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini akan menggunakan beberapa kaedah untuk menguatkan dan meningkatkan kualiti kajian yang dihasilkan. Kaedah tersebut ialah:

1. Kajian perpustakaan, dengan mengumpul bahan dan data serta melakukan analisis terhadap masalah yang berkaitan dengan sejarah serta fungsi ketiga organisasi ini terutama yang berhubung kait dengan mekanisma pengurusan fatwa.
2. Kajian lapangan, metode ini akan dijalankan melalui dua cara iaitu teknik temu ramah dan observasi. Penyelidik akan cuba menemu ramah pihak yang bertanggung jawab dari organisasi yang berkaitan dengan pengurusan fatwa di Thailand untuk mendapatkan input yang lebih tepat dan muktamad serta terkini.

1.7 SOROTAN LITERATUR

Selepas penelitian dilakukan, perbincangan umum tentang pengurusan fatwa di Thailand telah ada walaupun teramat sedikit. Contohnya satu kertas kerja yang telah dibentangkan oleh Dr. Ahmad Omar Chapakia dalam Seminar Pengurusan Fatwa Peringkat ASEAN anjuran KUIM pada Ogos 2005 lalu bertempat di Hotel Nikko, Kuala Lumpur. Walaupun begitu setelah diteliti kertas kerja tersebut yang berjumlah tujuh muka surat ia hanya menyebut secara umum tentang wujudnya beberapa institusi rasmi kerajaan sebagai platform bagi menyelesaikan masalah umat Islam di sana. Sementara aspek pengurusan, pelaksanaan fatwa, penguatkuasaan serta kedudukannya dalam undang-undang tidak dibincangkan.

Oleh itu suatu kajian yang khusus tentang pengurusan fatwa di Thailand perlu dijalankan secara terperinci bagi membuah input yang memuaskan dan mengetahui keperihatinan mereka terhadap permasalahan umat Islam di sana.

BAB II:

THAILAND DAN HUBUNGANNYA DENGAN UMAT ISLAM

Dalam bab ini, perbincangan adalah mengenai latar belakang negara Thai secara umum. Seterusnya disusuri dengan kaitan antara Islam dan umatnya dengan negara tersebut. Di samping itu, penyelidik juga akan menyentuh tentang undang-undang berkaitan umat Islam Thailand. Struktur pentadbiran Islam Thai juga turut serta diperincikan dan di akhir bab ini penyelidik akan menyentuh serba ringkas tentang pendidikan Islam di negara tersebut.

2.1 LATARBELAKANG NEGARA THAILAND

Thailand adalah sebuah negara yang berjiran dengan negara kita Malaysia. Ia terletak di sebelah utara tanahair. Keistimewaan negara Thailand ialah kedaulatannya yang tak pernah tercemar dengan sebarang penjajahan pihak luar. Negara ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Ini membuktikan kebijaksanaan pentadbiran kerajaannya.

Nama rasmi bagi kerajaan Thailand ialah Raja-anachakra Thai atau juga dikenali dengan nama Prathēt Thai. Kadangkala juga disebut Muang Thai. Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang bersempadanan dengan Laos dan Kemboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat.

Thailand dahulunya dikenali sebagai Siam sehingga 11 Mei 1949. Perkataan "Thai" bererti kebebasan dalam bahasa Thailand. (<http://www.tourismthailand.org/about/aboutthailand.aspx?ParentID=15>). Ada yang berpendapat perkataan tersebut merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan orang Thai terutama kaum minoriti Tionghua. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand#Sejarah>)

Ibu negara Thailand ialah Bangkok (Krung Thep) yang bermaksud Bandar Malaikat. Sebagai sebuah Negara yang besar, Thailand mempunyai 76 wilayah. Antaranya ialah

Amnat Charoen, Ang Thong, Buriram, Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep Mahanakhon (Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Sara Buri, Satun, Sing Buri, Sisaket, Songkhla, Sukhothai, Suphan Buri, Surat Thani, Surin, Tak, Trang, Trat, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Uthai Thani, Uttaradit, Yala, Yasothon.

Menurut sumber CIA, keluasan Thailand ialah 514,000 kilometer persegi. Bilangan penduduknya pula mencecah 65,444,371 orang pada 2006. Taburan agama pula ialah Buddha 94.6%, Islam 4.6%, Kristian 0.7% dan lain-lain 0.1%. Berdasarkan kenyataan ini agama Buddha merupakan agama anutan majoriti masyarakat Thailand dan Islam adalah agama kedua terbesar di kalangan rakyatnya. Sebahagian besar umat Islam Thai menetap di selatan Negara tersebut seperti di Narathiwat, Yala, Pattani dan Satun.

Thailand mengamalkan sistem Kerajaan monarki dalam pentadbirannya. Raja yang masih bertakhta sehingga kini ialah Raja Phumiphon Adunyadet. Raja Thai ini telah lama memerintah sejak 9 Jun 1946 iaitu selama 60 tahun. Manakala Perdana Menteri Thailand (2006) adalah Thaksin Shinawatra sejak 9 Februari 2001 hingga September 2006. Semasa menyiapkan penyelidikan ini, berlaku rampasan kuasa oleh pihak tentera Thai dan mereka akan mengumumkan Perdana Menteri yang baru secepat mungkin. (<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/th.html>)

2.2 ISLAM DI THAILAND

Umat Islam di Thailand adalah minoriti terbesar mengiringi masyarakat Buddha yang merupakan majoriti di sana. Umat Islam mewakili 4.6% daripada sejumlah 65 juta penduduk Thailand kini. (<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/th.html>) Umat Islam adalah majoriti di empat wilayah yang terdiri daripada Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun. Pattani dari segi sejarah ialah kerajaan Langkasuka Melayu lampau yang diasaskan pada abad pertama masehi. Langkasuka dianggap sebagai salah satu pelabuhan perdagangan yang penting untuk para pedagang Asia, terutama mereka yang belayar terus dari selatan Vietnam menyeberangi Teluk Siam ke Semenanjung Tanah Melayu. Apabila kuasa-kuasa besar dari rantau ini, seperti empayar Angkor di Kemboja, Pagan di Mon dan Srivijaya masuk campur dalam urusan Semenanjung tersebut, negeri-negeri kecil berjuang untuk mengekalkan kemerdekaan mereka dengan mempertahankan kedudukan yang terancam, kalau tidak, mereka akan hilang kedudukan. Kerajaan Langkasuka secara beransur-ansur menjadi lemah dan diganti oleh kerajaan Pattani. (W. K. Che Man. 1998. Hlm. 7)

Pattani dianggap salah satu pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Hubungan pertama Pattani dengan Islam berlaku hasil daripada perdagangan antara Arab dengan China. Saudagar India dan Arab menduduki pusat-pusat perdagangan Pattani pada akhir abad ke-12, telah berkahwin dengan penduduk tempatan dan membentuk asal usul masyarakat Islam. Lebih daripada tiga abad selepas itu Islam tersebar luas di kawasan tersebut. Golongan istana Pattani dipercayai mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi negara pada tahun 1457.

Keislaman Pattani membawa kepada kemunculan kesedaran baru mengenai identiti etnik yang membezakan orang Islam Pattani daripada orang Thai Buddha. Pertukaran Pattani kepada negara Islam melahirkan ikatan ideologi di kalangan penduduk tempatan. Islam menjadi satu kesedaran komuniti yang baru mengatasi kesetiaan peringkat tempatan dan wilayah. Malah Islam menjadi kuasa penyatu penduduk Pattani menghadapi pencerobohan daripada perluasan penjajahan. Ia memenuhi tuntutan tindakan revolusi melalui ideologi penyatuan ini dan kesedaran identiti etnik

yang baru, iaitu penentangan orang Islam terhadap perluasan Thai dilakukan dari masa ke semasa sejak abad ke -17.

Kerajaan Islam Pattani berkembang dari segi kependudukan dan kemakmuran. 'Pattani' mengikut Newbold (T. J. Newbold. 1971. Jil.2. Hlm. 67) pernah merupakan kawasan paling padat penduduk dari negeri-negeri Melayu di semenanjung ini. Ia dianggap sebagai kawasan perdagangan penting bagi pedagang Asia dan kawasan perdagangan penting bagi pedagang Asia dan Eropah. Kerajaan ini terdiri daripada dua dinasti Muslim yang besar: Dinasti Pattani (1688) dan Dinasti Kelantan (1688-1729). Tercetusnya peperangan saudara pada 1729 meletakkan Pattani dalam keadaan huru-hara. Long Yunus pemerintah terakhir Dinasti Kelantan telah terbunuh dalam perang saudara itu. Perang tersebut terus berlanjutan sehingga seorang bangsawan dari Dawai Mayo mampu menyatukan Pattani dan menggelarkan dirinya sebagai Sultan Mahmud. Sultan Mahmud memerintah Pattani hingga ia jatuh kepada kekuasaan Thai pada tahun 1786. (W. K. Che Man. 1998. Hlm. 8-9)

2.3 PENTADBIRAN ISLAM DI THAILAND

Thailand adalah sebuah negara di mana ia dikawal oleh pemerintahan pusat yang ketat. Semua agensi yang penting atau unit-unit kerajaan berpusat di Bangkok. Bahagian-bahagian negara samada zon, wilayah, daerah, mukim dan kampung berfungsi, terutama sekali sebagai wakil pelaksana bagi kerajaan pusat. Kerajaan tempatan hampir tidak mempunyai kuasa.

Di wilayah Islam sejumlah kecil pegawai-pegawai kerajaan dari daerah adalah orang Melayu Islam. Kebanyakan pegawai adalah orang Thai Buddha yang tidak biasa dengan adat dan bahasa tempatan. Justeru, seringkali berlaku perselisihan faham antara orang kampung dengan pegawai Thai. Pegawai tersebut mengesyaki orang kampung derhaka terhadap negara sementara orang Islam menganggap mereka sebagai penyalahguna kuasa yang melanggar hak kemanusiaan dan orang awam.

Orang Islam menjadi terasing dari arus politik Thai. Terdapat beberapa kekurangan penglibatan politik seperti kemampuan ekonomi yang terhad dan sekatan bahasa, tetapi sebab utama ialah kerajaan Thai tidak gemar melatih orang Islam dan merasa berat untuk meyakinkan mereka bahawa sistem politik Thai boleh berkhidmat kepada mereka. Sebaliknya, kerajaan Thai memandang orang Islam terutamanya pemimpin agama sebagai sumber penentang politik dan melayan sebagai bakal pemberontak.

Masyarakat Islam di empat wilayah secara tradisinya tidak mengambil peduli terhadap parti politik kebangsaan. Walau bagaimanapun dengan penggubalan dasar kerajaan yang menang dalam pilihanraya pada tahun 1975, pemimpin di kalangan orang Islam mula menunjukkan minat terhadap politik Thai dan mula menaruh kepercayaan terhadap kerajaan Thai. Mereka merasa kerajaan rakyat yang dipilih adalah lebih prihatin terhadap masalah rakyat jelata. Keyakinan ini menjadi pudar apabila tentera mengambil alih kuasa pada bulan Oktober 1976. (W. K. Che Man. 1998. Hlm. 21-22)

Sejak tahun 1945, institusi Islam kerajaan telah ditubuhkan dalam usaha menenangkan perasaan orang Islam dan meningkatkan hubungan yang lebih erat antara pimpinan orang Islam dan kerajaan pusat. Di samping itu, penggunaan undang-undang Islam dalam bidang kehakiman berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan berada di bawah menteri kehakiman yang melantik dua orang hakim Islam (Kadi) dalam setiap empat wilayah Islam tersebut.

Chula Ratmontri (Penasihat Negara Bagi Hal Ehwat Islam) yang merupakan ketua majlis negara bagi urusan Islam telah dipilih oleh komiti yang mempunyai anggota seramai 25 orang dari majlis negara tersebut dan 26 orang presiden daripada majlis wilayah dan kemudian dilantik oleh raja.

Chula Ratmontri berkhidmat sebagai penasihat urusan agama Islam kepada Kementerian Pendidikan dan juga sebagai pemimpin agama masyarakat dalam Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan fatwa kepada orang Islam.

Di peringkat wilayah, majlis wilayah urusan Islam (Khana Kamkarn Islam Cangwat atau Majlis Agama Islam) ditubuhkan di setiap wilayah yang mempunyai ramai penduduk Islam. Sekarang terdapat 26 buah majlis wilayah keseluruhannya. Majlis berperanan sebagai satu badan yang menasihati gabenor wilayah mengenai urusan yang berkaitan dengan Islam. Fungsinya juga mengawasi dan menyelaraskan majlis-majlis bagi masjid. Setiap majlis wilayah bagi urusan Islam mengandungi 15 orang ahli yang dipilih dan semuanya berjumlah 60 orang bagi empat wilayah.

Dari segi teori ahli majlis wilayah adalah orang yang berpendidikan dalam bidang Islam yang dipilih oleh Imam (ketua majlis masjid) melalui pemilihan rasmi. Dari segi praktikal bagaimanapun tidak semua ahli majlis tersebut merupakan orang yang berpendidikan samada dalam bidang keagamaan atau sebaliknya. Ramai kalangan mereka adalah orang yang bercita-cita tinggi yang mempunyai kepentingan untuk mencapai pangkat dalam pentadbiran. Sebahagian tidak mempunyai asas Islam, selalunya mereka mencapai kedudukan melalui pengaruh keluarga yang terkenal dan keluarga mereka yang dahulunya bangsawan. Dianggarkan tidak lebih 30% daripada ahli majlis adalah mereka yang berpendidikan dan mampu memberi nasihat kepada Thai mengenai urusan Islam.

Secara ringkasnya, majlis wilayah agama Islam di Pattani merupakan sebuah badan agama yang dilahirkan sebagai sebahagian struktur pentadbiran kerajaan untuk berkhidmat kepada kerajaan pada peringkat wilayah dengan pelbagai matlamat. Menasihati gabenor dan kerajaan wilayah yang lain berkenaan urusan agama Islam, menyebarkan polisi kerajaan melalui unit sosial agama yang berbagai dalam masyarakat tersebut, dan meningkatkan hubungan yang lebih erat antara orang Islam dengan kerajaan. Walau bagaimanapun majlis tersebut kurang berjaya mencapai matlamat ini sebab matlamat penduduk kampung orang Islam mendapati bahawa ia tidak berkhidmat demi kepentingan rakyat kecuali kepentingan mereka yang terlibat di dalamnya. (W. K. Che Man. 1998. Hlm. 71-73)

2.4 PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI THAILAND

Pada tahun 1815, negeri Patani dibahagikan kepada 7 negeri iaitu: negeri Pattani, negeri Nongchik, negeri Yaring, negeri Saiburi, negeri Jala (Yala), negeri Raman dan negeri Range’.

Dalam melicinkan pentadbiran dan pemerintahan di negeri-negeri ini yang mana secara keseluruhannya diduduki oleh masyarakat Melayu beragama Islam, kerajaan Thai telah mengeluarkan akta khas pada tahun 1901 dengan dinamakan “Akta Pemerintahan Kawasan Tujuh Negeri, R.S. 120 (1901)”. Akta yang mengandungi sebanyak 32 perkara turut membicarakan dengan jelas bahawa masyarakat Islam di 7 negeri ini diberikan kemudahan untuk mengguna Undang-undang Islam mengenai Keluarga dan Pusaka. Dalam melaksana dan memutuskan undng-undang Islam berkenaan ini dilantik *To’ Kali* (To’ Kadi) sebagai hakim.

Sejak tahun 1906, berlaku perubahan sistem pentadbiran di kawasan 7 negeri dengan dirombak dan dicantumkan menjadi 3 wilayah, iaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Pada tahun 1909, berlaku perjanjian Siam-Anglo di Bangkok. Dalam perjanjian itu, Satun diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan Thailand. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1917, Satun dimasukkan ke dalam kawasan yang menggunakan Undang-undang Islam. Dengan itu, terdapat 4 wilayah yang menggunakan Undang-undang Islam iaitu: Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Empat wilayah ini dipanggil dengan “*Kawasan 4 wilayah Sempadan Selatan*”.

Berdasarkan surat arahan Kementerian Keadilan pada 24 September 1917, istilah *To’ Kali* atau *To’ Kadi* iaitu selaku hakim atau pemutus undang-undang Islam itu diubah kepada *Dato’ Yutitham*. Selain itu, surat arahan itu juga menyatakan bahawa kuasa *Dato’ Yutitham* itu hanya membicarakan dan memutuskan undang-undang Islam mengenai Keluarga dan Pusaka yang berlaku di kalangan orang Islam di 4 wilayah selatan sahaja. Apabila kes-kes yang dibicara telah diputuskan, hendaklah *Dato’ Yutitham* menurunkan tanda tangan di atas keputusan itu bersama 2 orang atau bersama Hakim Mahkamah Wilayah. (Dr. Ahmad Omar Chapakia. 1999. Hlm. 12-13)

Mengenai cara dan proses perlantikan Dato' Yutitham, pada awalnya dibuat oleh Kementerian Keadilan dengan memilih daripada kalangan orang yang arif dan berpengetahuan agama dan mampu membicarakan dan memutuskan undang-undang Islam secara baik serta dapat menggunakan bahasa Thai. Cara dan proses perlantikan ini telah pun ditentang oleh para pemimpin masyarakat Islam di selatan. Di atas perkembangan itu, pihak Kementerian Keadilan telah pun mengubah cara perlantikan iaitu dijalankan dalam bentuk pemilihan. Mengikut peraturan baru, calon yang akan menjadi Dato' Yutitham mesti melalui cara pemilihan iaitu akan dipilih oleh Para Imam di wilayah berkenaan. Apabila cara ini dilaksanakan dalam beberapa tahun dan didapati cara pemilihan dalam bentuk demokrasi ini memberi kesan negatif dalam sistem kehakiman, maka pihak Kementerian Keadilan mengubah pula kepada cara terbaru iaitu melalui peperiksaan. Cara ini dikekalkan dan diamalkan sehingga sekarang. (Dr. Ahmad Omar Chapakia. 1999. Hlm. 16)

Di Thailand, tidak terdapat Mahkamah Syari'ah, maka perbicaraan undang-undang Islam mengenai Keluarga dan Pusaka adalah dilaksanakan di mahkamah wilayah. *Dato' Yutitham* dilantik oleh Kementerian Keadilan sebagai pegawai kerajaan di bahagian kehakiman. Seramai 2 orang Dato' Yutitham dilantik oleh Kementerian Keadilan di mahkamah 4 wilayah selatan iaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Wilayah Yala dibahagikan kepada 2 mahkamah iaitu Mahkamah Yala dan Mahkamah Betong. Mahkamah yang membicarakan undang-undang Islam di Thailand hanya 5 mahkamah sahaja iaitu Mahkamah Yala, Mahkamah Narathiwat, Mahkamah Pattani, Mahkamah Satun dan Mahkamah Betong. Status mahkamah-mahkamah wilayah itu ialah mahkamah rendah tetapi keputusan yang dibuat oleh Dato' Yutitham adalah muktamad dan hanya diberi kuasa untuk membicarakan dan memutuskan Undang-undang Islam mengenai Keluarga dan Pusaka sahaja. (Dr. Ahmad Omar Chapakia. 1999. Hlm. 16)

Kesimpulannya, atas dasar untuk meluaskan taklukan di kawasan Selatan, maka pihak kerajaan Thai berjaya menakluki negeri-negeri Melayu seperti Patani dan Satun. Penduduk negeri-negeri ini ialah dikalangan masyarakat Melayu beragama Islam.

Mereka mempunyai latar belakang sejarah, agama, bangsa dan budaya yang berlainan dengan penduduk majoriti Thai yang beragama Buddha. Sehubungan itu, 4 wilayah Selatan iaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun dianggap sebagai kawasan sensitif dalam politik pemerintahan kerajaan Thai. Dalam menghadapi cabaran ini, pihak kerajaan Thai sejak zaman monarki mutlak telah memberi kemudahan dan kebebasan kepada masyarakat Islam di 4 wilayah Selatan untuk menggunakan Undang-undang Islam mengenai Keluarga dan Pusaka. Undang-undang ini mula digunakan pada tahun 1901. Sehubungan dengan itu, telah diperkenalkan jawatan *To'Kali (To'Kadi)* dengan panggilan rasminya ialah *Dato' Yutitham* yang bertugas sebagai hakim.

Pada zaman pemerintahan kerajaan Phibun Songkhram, dasar penyatuan negara telah dilaksanakan. Dalam melaksanakan dasar dan polisi itu, Undang-undang Islam dan jawatan *Dato' Yutitham* turut dimansuhkan pada tahun 1943 seterusnya berlaku ketegangan politik di Selatan. Pada tahun 1945, Undang-undang Pentadbiran Institusi Islam di Thailand diluluskan ekoran pengambil alihan kuasa oleh pihak demokrasi dalam pemerintahan kerajaan Thai. Kemudian, pada tahun 1946, kerajaan telah meluluskan Undang-undang Islam mengenai Keluarga dan Pusaka untuk digunakan di 4 wilayah Selatan iaitu Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun.

Berikutan perkembangan yang positif itu, jawatan *Dato' Yutitham* dihidupkan kembali dengan melantik 2 orang *Dato' Yutitham* di mahkamah wilayah di 4 wilayah Selatan. Pada tahun 1997, di bawah perkembangan politik demokrasi, pihak parlimen Thai yang dipimpin oleh Wan Mohammad Noor Matha telah meluluskan pindaan undang-undang pentadbiran institusi Islam di Thailand. Tindakan itu dianggap sebagai langkah terkini dalam menjadikan Institusi yang mentadbir hal ehwal Islam lebih berwibawa dan berperanan dalam memimpin masyarakat Islam di Thailand.

2.5 UNDANG-UNDANG DASAR KERAJAAN THAI

Menurut sebuah buku karangan Chula Ratmontri yang diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Jemaah Komuniti Pusat Islam Thai, terdapat beberapa undang-undang dasar Kerajaan Thai yang mesti diketahui oleh masyarakat minoriti Islam di sana. Antaranya ialah seperti berikut:

Ayat yang ke-1:

Negara Thai merupakan kerajaan bersatu, tidak boleh dibahagi-bahagi.

Ayat yang ke-8:

Maharaja sebagai sesuatu lembaga yang mesti dipuja. Sesiapapun tidak boleh melalaikannya. Barangsiapa pun tidak boleh menuduh atau mengadu Maharaja, walau dengan cara apa pun jua.

Ayat yang ke-9:

Maharaja merupakan Buddha-Ma-Ma'Ka' an menjadi penyokong agama.

Ayat yang ke-5:

Rakyat Thai, dari mana pun tempat asalnya, apa pun jantinya, apa pun agamanya, mereka semuanya berada di bawah naungan undang-undang dasar ini secara sama rata.

Ayat yang ke-26:

Dalam berkuasa, semua kakitangan kerajaan mesti menyedari akan perikemanusiaan, hak dan kebebasan menurut undang-undang dasar ini.

Ayat yang ke-30:

Seseorang mesti sama darjatnya, baik dalam hukum dan mendapat perlindungan menurut hukum secara sama rata, biarpun lelaki atau perempuan mesti mempunyai hak yang sama. Perbuatan yang berbentuk pilih kasih, yang tidak adil terhadap seseorang disebabkan kerana perbezaan dalam hal tempat asal, bangsa, bahasa, jantina,

umur, keadaan tubuh badan atau kesihatan, darjat orang, darjat ekonomi atau tingkatan dalam masyarakat, keyakinan agama, pendidikan atau pemikiran, siasah politik, yang tidak berlawanan dengan undang-undang dasar. Kesemuanya itu tidak boleh dilakukan sama sekali.

Ayat yang ke-38:

Seseorang mesti ada kebebasan sepenuhnya dalam beragama, bermazhab atau berkeyakinan dalam beragama dan mesti ada kebebasan dalam berbuat menurut peraturan agama yang mereka imani. Atau mengamalkan segala amal menurut keyakinan mereka selama hal tersebut tidak berlawanan dengan tugasnya sebagai anak negeri yang baik dan tidak berlawanan dengan kesejahteraan dan akhlak rakyat.

Perihal menjalankan kebebasan menurut perenggan satu, seseorang mesti mendapatkan perlindungan. Pihak kerajaan tidak boleh berbuat hal-hal yang akan mengurangi hak atau menyia-nyiakan kepentingan yang mesti didapatkannya, oleh kerana di dalam beragama, bermazhab, berkeyakinan dalam agama atau berbuat menurut peraturan agama atau berbuat menurut keyakinan yang berbeza dengan keyakinan orang lain.

Ayat yang ke-73:

Pihak kerajaan mesti memberikan sokongan dan perlindungan kepada agama Buddha dan agama-agama lainnya serta membina kefahaman yang baik dan bersatu padu antara sesama orang beragama, lagi pula mesti menyokong akan hal-hal yang membawa kepada pembinaan akhlak dan membina kualiti hidup mereka sepenuhnya.

Ayat yang ke-39:

Seseorang mesti bebas dalam mengeluarkan buah fikiran, berbicara, menulis, menerbit, iklan (memperkenalkan barang-barang) dan berhubungan dengan cara lain.

Ayat yang ke-44:

Seseorang mesti bebas dalam bermesyuarat dengan aman dan tidak bersenjata.

Ayat yang ke-46:

Seseorang yang berkumpul menjadi suatu masyarakat tempatan mesti ada hak untuk menjaga atau menghidupkan adat, budaya, hasil buah fikiran tempatan, seni atau kebudayaan yang ada di dalam masyarakat tempatan dan negara, yang mana ada penyertaan dalam mengurus, memelihara. Dan memanfaatkan sumber daya alam dan alam sekitar secara layak dan berkekalan. Namun kesemuanya itu mesti sesuai menurut ketentuan dari undang-undang dasar.

Ayat yang ke-61:

Seseorang mesti ada hak untuk mengadukan segala masalah dan mendapat jawapannya dalam masa yang layak, dengan syarat mesti sesuai menurut undang-undang dasar.

Ayat yang ke-62:

Hak seseorang yang akan mengadukan suatu hal kepada pihak kerajaan, pejabat-pejabat kerajaan, pemerintah swasta. Urusan kerajaan tempatan atau badan-badan kerajaan yang lain yang bersifat peribadi, supaya mengaku bersalah disebabkan berbuat atau pilih kasih dari pegawai kerajaan, petugas atau pegawai dari pejabat itu supaya melindunginya. Kesemuanya itu mesti sesuai menurut undang-undang dasar negara.

Ayat yang ke-76:

Pihak kerajaan mesti menolong dan menyokong penyertaan dari masyarakat dalam menentukan polisi di dalam menjalankan politik negara, mengatur pelan pembangunan dari segi ekonomi, kemasyarakatan dan siasah serta memeriksa penggunaan kekuasaan di setiap tingkat.

Ayat yang ke-77:

Pihak kerajaan mesti merancang pelan pembangunan negara, membuat standard dari segi akhlak dan peradaban bagi orang yang memegang jabatan negara, pegawai dan kakitangan negara atau orang gaji kerajaan lainnya untuk menanggapi tipu daya (korupsi) dan perbuatan jahat dan membina kualiti dalam menjalankan tugasnya.

Ayat yang ke-78:

Pihak kerajaan mesti menyebarkan kuasa pada masyarakat tempatan supaya mereka boleh memutuskan perkara dalam tempat mereka, memajukan sistem ekonomi tempatan, sistem penggunaan umum, pembangunan umum, binaan mendasar, informasi tempatan secara menyeluruh dan sama rata di seluruh negeri, serta memajukan Changwad-changwad yang bercukupan agar menjadi badan pemerintah tempatan (U.B.T) yang besar, dengan mementingkan kehendak masyarakat tempatan.

Ayat yang ke-79:

Pihak kerajaan mesti memberi dan menggerakkan masyarakat supaya dapat turut serta dalam memelihara dan menjaga kepentingan umum mengenai sumber daya alam dan bermacam ragam bionik secara layak, juga turut serta dalam membina, memelihara dan melindungi kualiti alam sekitar menurut kaedah pembinaan yang kekal, serta mengawal dan memperbaiki kerosakan alam sekitar yang mengganggu kesihatan, anggota badan, kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat.

Ayat yang ke-80:

Pihak kerajaan mestilah melindungi dan membina kanak-kanak dan para remaja serta memberi sokongan mengenai kebersamaan, baik lelaki mahupun perempuan, membina dan membentuk persatuan dalam keluarga dan membentuk kekuatan di dalam masyarakat.

Ayat yang ke-81:

Pihak kerajaan mesti mengadakan latihan (seminar) dan menyokong orang awam supaya mengadakan kegiatan berlatih untuk menambah ilmu pengetahuan dan akhlak, menentukan hukum berkenaan dengan pendidikan negara, memajukan pendidikan sesuai dengan perubahan zaman, dari segi ekonomi dan masyarakat, membina ilmu dan menanamkan perasaan di bawah alam sadar mengenai siasah politik, pemerintahan, sistem demokrasi yang mana ada raja sebagai pemimpin tertinggi, memberi sokongan dalam penelitian di berbagai ilmu pengetahuan, bergerak cepat dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju negara yang membangun,

memajukan ilmu keagamaan dan menyokong hasil buah fikiran masyarakat tempatan, memajukan kesenian dan kebudayaan negara. (Bahagian Pendidikan Jemaah Komite Pusat Islam Thai, Hlm. 33-39)



1.4.1 Chula Ramoursi

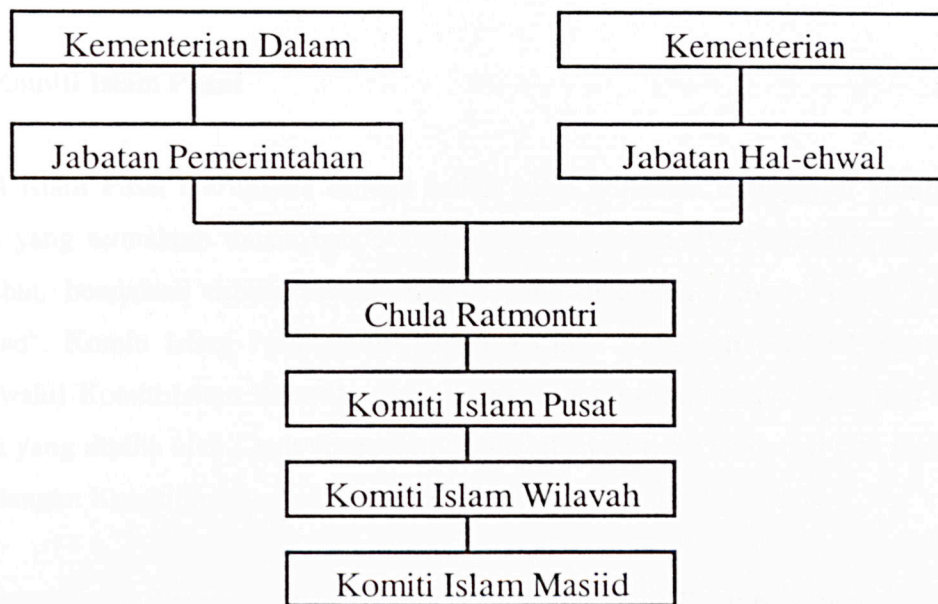
Chula Ramoursi merupakan salah satu jenis persembahan yang unik dan berbeza dengan persembahan Islam yang lain. Persembahan ini adalah sejenis persembahan yang dibuat oleh para ulama yang berkecuali dengan persembahan Islam yang lain. Persembahan ini dibuat oleh para ulama yang berkecuali dengan persembahan Islam yang lain. Persembahan ini dibuat oleh para ulama yang berkecuali dengan persembahan Islam yang lain.

Chula Ramoursi adalah sejenis persembahan yang unik dan berbeza dengan persembahan Islam yang lain. Persembahan ini adalah sejenis persembahan yang dibuat oleh para ulama yang berkecuali dengan persembahan Islam yang lain. Persembahan ini dibuat oleh para ulama yang berkecuali dengan persembahan Islam yang lain.

Chula Ramoursi adalah sejenis persembahan yang unik dan berbeza dengan persembahan Islam yang lain. Persembahan ini adalah sejenis persembahan yang dibuat oleh para ulama yang berkecuali dengan persembahan Islam yang lain. Persembahan ini dibuat oleh para ulama yang berkecuali dengan persembahan Islam yang lain.

2.6 SUSUNAN PENTADBIRAN INSTITUSI ISLAM DI THAILAND

Struktur pentadbiran Institusi Islam di Thailand bolehlah digambarkan menerusi carta berikut:



2.6.1 Chula Ratmontri

Chula Ratmontri adalah ketua masyarakat Islam dan pemimpin bagi urusan agama Islam di Thailand sepertimana yang termaktub dalam Artikel 6 Undang-undang Islam 1997. pemilihan Chula Ratmontri itu dibuat oleh Ahli Jawatankuasa dari setiap wilayah. Kemudian nama calon yang terpilih akan dibawa oleh Perdana Menteri menghadap Raja untuk perlantikan secara rasmi.

Mengenai kelayakan untuk dilantik menjadi Chula Ratmontri, ianya ditentukan oleh Undang-undang Islam yang baru iaitu sepertimana yang ditetapkan pada Artikel 7 dengan menggariskan 10 syarat yang perlu ada pada seseorang calon.

Berdasarkan proses pemilihan dan perlantikan serta syarat-syarat kelayakan untuk menjadi Chula Ratmontri, sudah tentu seseorang yang akan menjadi Chula Ratmontri

adalah daripada kalangan orang yang berpengetahuan agama dan menjadi pemimpin masyarakat yang diakui dan dikenali umum. Ini disebabkan pemilihannya dilakukan oleh para pemimpin masyarakat Islam daripada wilayah-wilayah berkenaan yang mana bilangan mereka tidak kurang daripada 500 orang. (Dr. Ahmad Omar Chapakia. 1999. Hlm. 5-6)

2.6.2 Komiti Islam Pusat

Komiti Islam Pusat merupakan sebuah badan Islam berkanun tertinggi di Thailand seperti yang termaktub dalam bab 3 Undang-undang Islam, 1997. Pada Artikel 16 menyebut, hendaklah dibuat sebuah Komiti yang dipanggil "Komiti Islam Pusat Thailand". Komiti Islam Pusat terdiri daripada Chula Ratmontri selaku Pengerusi, wakil-wakil Komiti Islam Wilayah yang mewakili seorang dari satu wilayah dan ahli Komiti yang dipilih oleh Chula Ratmontri dalam bilangan tidak lebih dari satu pertiga dari bilangan Komiti Pusat.

Sepertimana yang ditentukan dalam Artikel 18, Komiti Islam Pusat bertanggungjawab dan berkuasa dalam :

1. Memberi pandangan dan nasihat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dalam melaksanakan undang-undang ini.
2. Memberi pandangan dan cadangan mengenai urusan agama Islam kepada Komiti Islam Wilayah dan Komiti Islam Masjid.
3. Melantik ahli jawatankuasa kerja untuk melaksanakan kerja yang diserahkan mandat oleh Komiti Islam Pusat.
4. Mengeluarkan peraturan mengenai pentadbiran harta dan pengurusan sumber pendapatan bagi Komiti Islam Wilayah dan Masjid.

5. Mengeluarkan peraturan dalam pelaksanaan kerja dan pengurusan pentadbiran bagi Komite Islam Wilayah dan Masjid.
6. Melaksanakan kerja sebagai Komite Islam Wilayah di wilayah-wilayah yang belum menubuhkan komiti ini.
7. Membicarakan pengaduan yang dikemukakan oleh Komite Masjid seperti yang termaktub dalam Artikel 4.
8. Mengadakan daftar harta, dokumen dan bancian perbelanjaan bagi Pejabat Komite Islam Pusat berdasarkan pada hakikat kenyataan.
9. Membuat kenyataan dan memberi pengesahan mengenai urusan agama Islam.
10. Menguruskan kegiatan mengenai agama dan pendidikan Islam.
11. Menyelaras dengan pejabat-pejabat kerajaan dalam urusan yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Komite Islam Pusat ini dilantik secara rasmi oleh Raja dan berada dalam jawatan selama 6 tahun. Ahli Komite ini boleh dipilih daripada kalangan ahli politik. Contohnya, Phaisan Yingsaman merupakan Ahli Parlimen Wilayah Yala yang mana mewakili Komite Islam Wilayah Yala sebagai Ahli Komite Islam Pusat. (Dr. Ahmad Omar Chapakia, 1999. Hlm. 7-8)

2.6.3 Komite Islam Wilayah (Majlis Agama Islam Wilayah)

Pada bab 4 dalam Undang-undang Islam 1997, membicarakan mengenai Komite Islam Wilayah. Pada Artikel 23, mana-mana wilayah yang terdapat masyarakat Islam dan mempunyai masjid, mengikut Artikel 13 dengan bilangan yang tidak kurang daripada

3 masjid, hendaklah Komite Islam Pusat menguruskan supaya wilayah itu membentuk Komite Islam Wilayah dengan jumlah ahlinya tidak kurang daripada 9 orang dan tidak lebih daripada 30 orang.

Ahli Komite Islam Wilayah diberi tempoh selama 6 tahun untuk memegang jawatan tersebut. Pada Artikel 26, Komite Islam Wilayah mempunyai kuasa dan tugas dalam :

1. Memberi nasihat dan pandangan mengenai agama Islam kepada Gabenor.
2. Mengawal dan mengawasi pelaksanaan kerja yang dijalankan oleh Komite Masjid di wilayahnya.
3. Memutuskan aduan dan rayuan yang dibuat oleh makmum masjid di atas ketidakadilan Komite Masjid.
4. Menyelia pemilihan ahli Komite Masjid supaya berjalan dengan lancar.
5. Melantik dan melucutkan kuasa ahli Komite Masjid.
6. Memeriksa dan meneliti Komite Masjid yang dilucutkan jawatannya mengikut Artikel 40 (4).
7. Mengarahkan supaya membekukan tugas Komite Masjid yang sedang diselidiki.
8. Membuat pertimbangan mengenai penubuhan masjid, pemindahannya dan pembatalannya.
9. Melantik pemangku Imam, Khatib dan Bilal apabila berlaku kekosongan jawatan.

10. Mengeluarkan surat akuan perkahwinan dan surat cerai mengikut Undang-undang Islam.
11. Mendamaikan perbalahan dan perselisihan mengenai masalah keluarga dan pusaka mengikut Undang-undang Islam.
12. Menguruskan supaya mengadakan daftar harta, dokumen dan bancian wang masuk dan keluar bagi pejabat Komiti Islam Wilayah supaya betul dan semasa memberi laporan mengenai pelaksanaan kerja, kedudukan kewangan dan harta kepada Komiti Islam Pusat pada bulan Mac setiap tahun.
13. Membuat kenyataan dan pengesahan terhadap kegiatan hal ehwal Islam dalam wilayah.

Pada Artikel 29, Komiti Islam Wilayah yang sudah dibentuk hendaklah mengadakan pejabat kerja dalam status berkanun untuk melaksanakan kerja Komiti Islam Wilayah dan setiausaha Komiti Islam Wilayah bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran pejabat. Pada tahun 2001, Komiti Islam Wilayah yang sudah dibentuk secara rasmi adalah sebanyak 33 wilayah. (Dr. Ahmad Omar Chapakia. 1999. Hlm. 9-10)

2.6.4 Komiti Islam Masjid (Jawatankuasa Masjid)

Termaktub dalam Artikel 30, Komiti Islam hendaklah dibentuk di peringkat masjid dengan terdiri daripada Imam iaitu selaku Ketua Komiti, manakala Khatib dan Bilal sebagai Naib Ketua, dan Ahli Komiti yang dipilih oleh ma'mum atau penduduk setempat (berumur 15 tahun ke atas) dengan bilangan yang di hadkan oleh undang-undang iaitu tidak kurang daripada 6 orang dan tidak lebih daripada 12 orang.

Dalam menguruskan pemilihan Komiti masjid itu, ianya diuruskan oleh Ketua Komiti Islam Wilayah atau wakilnya selaku pengerusi majlis pemilihan, kemudian calon-calon yang terpilih itu dibentangkan kepada Komiti Islam Wilayah untuk pengesahan

dan perlantikan rasmi mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Komiti Islam Pusat Thailand.

Dalam Artikel 35, kuasa dan tugas Komiti Islam Masjid adalah seperti berikut :

1. Menjaga masjid dan hartanya dengan teratur
2. Membuat peraturan pentadbiran masjid supaya perjalanannya teratur.
3. Melaksanakan arahan dan pandangan yang dikemukakan oleh Komiti Islam Pusat dan Komiti Islam Wilayah selama tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan undang-undang.
4. Menyokong makmum dalam melaksanakan kegiatan agama, menyokong langkah-langkah yang menimbulkan perpaduan dan tolong menolong di jalan yang di redhai oleh agama Islam.
5. Membuat perbincangan dalam menerima muslim sebagai makmum masjid.
6. Memberi kemudahan dan mendidik makmum masjid supaya berpegang dengan ajaran Islam dan beriltizam secara kuat.
7. Menyelesaikan dan mendamaikan perbalahan dan perselisihan antara makmum masjid.
8. Menyediakan buku daftar makmum masjid dan mengawasi supaya kandungan buku itu benar.
9. Melucutkan nama makmum masjid daripada buku pendaftaran apabila diselidiki dan didapati makmum itu bersalah mengikut Syari'at Islam.

10. Menyediakan buku pendaftaran harta, dokumen dan banciaan perbelanjaan masjid serta membuat laporan tahunan dan dihantarkan kepada Komite Islam Wilayah pada bulan Mac di setiap tahun.
11. Melihat anak bulan dan melaporkannya kepada Komite Islam Wilayah.
12. Menyokong pendidikan dan menguruskan kegiatan yang tidak bercanggah dengan ajaran agama Islam.

Selain itu, dalam Artikel 37, ditentukan tugas-tugas bagi para Imam, Khatib dan Bilal secara menyeluruh. (Dr. Ahmad Omar Chapakia. 1999. Hlm. 11-12)

2.7 PENDIDIKAN ISLAM DI THAILAND

Penganut Islam kebanyakannya berasal dari kerajaan Patani di Selatan Thailand. Pengislaman Patani memisahkannya daripada pengaruh budaya Hindu-Buddha yang merupakan agama rasmi di Thailand. Islam menggantikan kebanyakan kebudayaan dan institusi yang lama dengan kebudayaan yang baru berdasarkan nilai-nilai Islam. Selepas Patani diisytiharkan sebagai sebuah negara Islam, masjid institusi Islam yang pertama penting ditubuhkan sebagai pusat pengajaran agama dan aktiviti sosial. Melalui masjid, nilai-nilai Islam disebarkan dan Ulama Islam beransur-ansur muncul dan menjadi kumpulan elit yang berpengaruh dalam masyarakat Patani.

Ulama di Patani selalunya mempunyai hubungan yang erat dengan tempat dan kerajaan lain yang memerintah serta pedagang-pedagang kaya yang dianggap mewakili ketamadunan yang lebih tinggi. Mereka dipandang tinggi sebagai pembawa pembaharuan dan membuang belunggu yang lepas. Pengaruh Ulama sangat dirasakan dalam masyarakat Patani. Perlantikan Ulama memegang jawatan-jawatan politik dan agama dalam kerajaan Patani sudah menjadi amalan budaya istana sepanjang beberapa pemerintahan Patani.

BIBLIOGRAFI

Al-Quran al-Karim

Abu Zahrah, Muḥammad. 1948. *al-Shāfi'iy ḥayātuh wa aṣruḥ Ārā'uh wa Fiqhuh*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-^cArabiyy.

Ahmad Omar Chapakia. 1999. *Undang-undang Pentadbiran Islam di Thailand*. Yala: Kolej Islam Yala.

Ahmad Omar Chapakia. 2005.. *Pengurusan Fatwa: Pengalaman Thailand*. (Kertas Kerja Seminar Pengurusan Fatwa Peringkat Asean). Kuala Lumpur: KUIM.

Dewan Bahasa Dan Pustaka. 2002. *Kamus Dewan*. Kuala Lumpur: Harian Sdn. Bhd. Edisi 3.

Majlis Agama Wilayah Yala. T. th. *Keputusan Mesyuarat Majlis Agama Islam 5 Wilayah Sempadan Pattani*, Yala, Narathiwat, Songkhla, Satun. Bilangan: 15.9/1426/073.

Majlis Agama Wilayah Yala. 1426H. *Hukum Rujuk Nazar Mu'allaq*. Jam'iah Ulama' Fatani Darussalam. Bil. 2/1426H.

Majma^c Al-Lughghah Al-^cArabiyyah. T. th. *Al-Mu^cjam Al-Waṣīṭ*. Istanbul, Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyyah.

Mohd Lazim Lawi. 2005. *Sejarah Awal Kemasukan dan Perkembangan Islam di Patani*. Sejarah dan Perkembangan Agama Anutan Masyarakat Melayu Patani. Kolej Islam Yala.

Pra'srat Ma'ha'mad. T. Th. *Jawapan Chula Ratmontri Mengenai Masalah dalam Melaksanakan Ajaran Islam*. Bangkok: Bahagian Pendidikan Jemaah Komite Pusat Islam Thai.

Robert Winzeler. 1974. *The Social Organisation of Islam in Kelantan*. Dalam *Kelantan : Religion, Society and Politics in Malay State*, William R. Rolf (edit). Kuala Lumpur.

T. J. Newbold. 1971. *Political and Statistical Account of The British Settlement In The Straits of Malacca*. London: Oxford University Press.

W. K. Che Man. 1998. *Islam di Patani Semasa*. Minoriti Muslim di Thailand. Selangor: Penerbit L Minda.

W. K. Che Man. 1998. *Melayu Muslim Selatan Thailand*. Minoriti Muslim di Thailand Selangor: Penerbit L Minda.

Wan Ismail bin Haji Wan Daud. 1426H. *Risalah Dakwah – Penggal 5*. Majlis Agama Islam Wilayah Yala.

Internet

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2890&version=1&template_id=24&parent_id=1

<http://www.tourismthailand.org/about/aboutthailand.aspx?ParentID=15>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand#Sejarah>

<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/th.html>

Temuramah

Ismail Lutfi Japakia. Ahli Majlis Penasihat Chula Ratmontri dan Rektor Kolej Islam Yala. *Pengurusan Fatwa di peringkat Chula Ratmontri*. (Temuramah) 9 Mei 2006

Ahmad Omar Chapakia. Timbalan Rektor Kolej Islam Yala. *Pengurusan Fatwa di Thailand*. (Temuramah) 9 Mei 2006

Abdul Basit bin Che Ma'. Timbalan Yang Di Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Yala. *Pengurusan Fatwa di Majlis Agama Islam Wilayah Yala*. (Temuramah) 10 Mei 2006